

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI**

**Naskah publikasi dengan judul:**

**Alasan Donald Trump Menghentikan Dukungan terhadap *Trans-Pacific Partnership (TPP)*  
pada tahun 2017**



**DESSY AYU UTAMI**

**20140510184**

**Disetujui Oleh:**

**Ratih Herningtyas, S.IP., M.A**

**Dosen Pembimbing**

**ALASAN DONALD TRUMP MENGHENTIKAN DUKUNGAN TERHADAP  
TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (TPP) PADA TAHUN 2017**

**Dessy Ayu Utami**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jalan Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184  
Telp. (0274) 387656  
Email: ayutamidessy@gmail.com

**ABSTRACT**

*This paper explain the Donald Trump's reasons to stop the involvement and support for the Trans-Pacific Partnership (TPP) in 2017. During the Obama administration the US strongly supported the running of the TPP and US as if "the face of the TPP". Obama also actively promotes and invites countries in the Asia Pacific region to join the TPP. However, the United States changed policy direction after changing leadership. Trump as a replacement for Obama has a contradictory policy and decides to stop support for the TPP. And this paper focuses on Donald Trump's reasons behind the decision which contradicts Obama's policy. Using the theory of perception, this research will find out Trump's reasons to stop US support for the Trans-Pacific Partnership.*

*Keyword: Trans-Pacific Partnership (TPP), US Foreign Policy, Donald Trump*

**1. PENDAHULUAN**

Model kerjasama perdagangan regional yang menciptakan perdagangan bebas antar negara sangat identik jika dikaitkan dengan Amerika Serikat. Kerjasama perdagangan bebas ini tidak lepas dari sifat naluriah AS sebagai negara liberal kapitalis. Bergabung dengan blok-blok perdagangan menjadi salah satu upaya AS untuk mencapai kepentingan-kepentingan strategis ekonomi dan memberikan keuntungan bagi AS. Dan nampaknya, bergabung dengan satu organisasi saja tidak cukup bagi AS. AS selalu berupaya melibatkan diri dalam blok-blok

perdagangan, baik berbentuk formal maupun informal, termasuk berusaha untuk bergabung dengan keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) pada tahun 2008.

*Trans-Pacific Partnership* (TPP) dirancang untuk mencakup 40 persen ekonomi global dan sepertiga perdagangan global dengan tujuan utama yaitu untuk menetapkan standar baru bagi perdagangan global yang akan meningkatkan daya saing negara-negara anggota TPP dalam tingkat ekonomi global. Termasuk juga akses pasar yang kompetitif dengan berusaha menghilangkan tarif dan hambatan perdagangan dan investasi, untuk menciptakan peluang baru di kedua bidang - pekerjaan dan bisnis - dan manfaat langsung bagi konsumen<sup>1</sup>.

Amerika Serikat di bawah pemerintahan Obama tidak ingin kehilangan kesempatan sebagai kekuatan Pasifik. AS telah mendorong untuk mengembangkan TPP sebagai kemitraan yang bertaraf tinggi melalui sebuah kesepakatan perdagangan dan memanfaatkan TPP untuk menyeimbangkan Tiongkok terutama di kawasan Asia-Pasifik, baik dari sudut pandang ekonomi maupun keamanan.

Bergabungnya AS dengan TPP dinilai akan menjadi suatu kesempatan yang baik, karena negara-negara anggota TPP merupakan mitra dagang serta relasi yang penting bagi AS. Obama berusaha meyakinkan Kongres dan menunjukkan optimisme bahwa TPP merupakan suatu langkah yang baik bagi AS terutama dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, Obama dengan giat mempromosikan TPP kepada negara-negara lain agar ikut bergabung dengan TPP dan merumuskan *TPP Agreement* atau kesepakatan.

Setelah melalui proses negosiasi yang panjang antar negara anggota TPP selama kurang lebih enam tahun akhirnya ditemukan sebuah kesepakatan akhir yang disebut *TPP Agreement* (Kesepakatan TPP). Kesepakatan itu dibuat pada tanggal 5 Oktober 2015, kemudian diumumkan pada tanggal 5 November 2015, dan ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2016 di Auckland, Selandia Baru. Para menteri perdagangan dari Amerika Serikat dan 11 negara Pasifik lainnya secara resmi menandatangani kesepakatan perdagangan regional terbesar dalam sejarah di Selandia Baru. Namun, nasib proyek ekonomi yang memerlukan tanda tangan Obama ini tertahan di Capitol Hill<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> *Trans-Pacific Partnership Trade Ministers*. Office of the United States Trade Representative. 2013

<sup>2</sup> Nakamura, D. (2016, February 3). *U.S., 11 nations formally sign largest regional trade deal in history* diakses dari The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/politics/us-11-nations-formally-sign-largest-regional-trade-deal-in-history/> pada tanggal 2 November 2017

Pada tahun 2016 AS mengalami pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Donald Trump dengan memperoleh 306 suara, sedangkan lawannya yakni Hillary Clinton memperoleh 232 dari suara total<sup>3</sup>. Arah kebijakan dan politik luar negeri AS berubah ketika AS melakukan pergantian kepemimpinan. Trump memiliki pandangan yang berbeda dengan Obama terkait kebijakan luar negeri. Beberapa hari pasca resmi dilantik menjadi presiden AS, pada tanggal 23 Januari 2017 Trump mewakili Amerika Serikat secara resmi menarik diri dan menghentikan dukungan terhadap TPP melalui penandatanganan sebuah memorandum dengan subyek “*Withdrawal of the United States from the Trans-Pacific Partnership Negotiations and Agreement*”<sup>4</sup>. Memorandum tersebut berisi kebijakan Trump dalam menarik Amerika Serikat sebagai penandatangan Trans-Pacific Partnership (TPP), untuk secara permanen menarik Amerika Serikat dari negosiasi TPP dan memulai negosiasi perdagangan bilateral, dengan tujuan untuk mempromosikan industri Amerika, melindungi pekerja Amerika, dan menaikkan upah. Kebijakan administrasi yang ia lakukan bermaksud untuk melindungi kesejahteraan finansial masyarakat AS, serta khususnya pekerja Amerika, dan untuk menciptakan transaksi perdagangan yang adil dan menguntungkan secara ekonomi yang melayani kepentingan masyarakat AS. Dengan tercatatnya memorandum tersebut sebagai dokumen presiden dalam *Federal Register* Vol.82, No.15 yang diterbitkan pada Rabu, 25 Januari 2017, AS resmi menarik diri dari negosiasi TPP *Agreement* dan menghentikan semua dukungan terhadap TPP.

Dengan paparan pembahasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat pertanyaan penelitian yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian tersebut yaitu Mengapa Donald Trump menghentikan dukungan terhadap TPP pada tahun 2017?

## 2. Kerangka Teori

### Teori Persepsi

Persepsi adalah sistem keyakinan, citra atau model tentang dunia yang dianut oleh seseorang membantunya berorientasi terhadap lingkungan, mengorganisasikan persepsi sebagai penuntun tindakan, menentukan tujuan dan bertindak sebagai saringan dalam menyeleksi

---

<sup>3</sup> *Presidential Election Results: Donald J. Trump Wins*. (9 Agustus 2017) diakses dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/elections/results/president>

<sup>4</sup> *Memorandum: Withdrawal of the United States From the Trans-Pacific Partnership*. Washington: Federal Register. 2017

informasi dalam setiap situasi<sup>5</sup>. Hal ini yang menyebabkan persepsi para pembuat keputusan menempati posisi sentral dalam penentuan pembuatan keputusan dan seringkali menghasilkan keputusan yang berbeda.

Menurut Kenneth Boulding teori persepsi adalah sebuah teori di mana ketika seseorang bereaksi terhadap dunia sekitarnya, sebenarnya ia sedang bereaksi terhadap citra dirinya tentang dunia. Sedangkan dunia nyata dan persepsi dirinya tentang dunia mungkin saja berbeda. Jadi, orang akan melakukan tindakan (bereaksi) berdasarkan pada apa yang mereka "*ketahui*". Tanggapan seseorang pada suatu situasi juga tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi itu. Perbedaan dalam perilaku manusia ini berkaitan dengan perbedaan cara orang memandang "*kenyataan*"<sup>6</sup>.

Russett dan Starr menjelaskan pula mengenai bagaimana hubungan antara citra, persepsi, dan perilaku internasional melalui tiga tahap. Pertama, adanya stimulus atau rangsangan dari lingkungan, yang disebut "*trigger event*" yang muncul untuk ditanggapi oleh para pembuat keputusan. Stimulus ditentukan dari apa yang dilihat dan apa yang diperhatikan. Kedua, adanya upaya mempersepsi stimulus itu. Pada tahap ini pembuat keputusan melakukan seleksi, menata, dan menilai informasi yang masuk. Ketiga, harus ada upaya menafsirkan stimulus yang telah dipersepsi itu. Persepsi dan penafsiran itu sangat tergantung pada citra yang ada dalam benak si pembuat keputusan. Dalam hal ini terdapat dua jenis citra, yaitu terbuka dan tertutup. Citra yang terbuka menerima semua informasi yang baru, walaupun mungkin bertentangan dengan citra yang dipegang selama ini, dan menggabungkannya dengan citra yang telah dipegang itu, bahkan kalau perlu merubah citra yang sudah dianut agar cocok dengan kenyataan. Sedangkan citra yang tertutup menolak adanya perubahan sehingga mengabaikan informasi yang bertentangan dengan citra yang selama ini dipegang<sup>7</sup>.

Tahapan-tahapan yang telah dijabarkan oleh Russett dan Starr digambarkan oleh Ole R. Holsti dalam sebuah diagram mengenai hubungan persepsi, citra dan sistem keyakinan (*belief system*) dengan keputusan politik luar negeri.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Mas'ood, M. *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: PAU-SS-UGM. 1989

<sup>7</sup> *Ibid*

Menurut Holsti, setiap orang hanya memperhatikan sebagian saja dari dunia sekitarnya, dan setiap orang memiliki serangkaian citra yang berbeda-beda untuk menginterpretasikan informasi yang masuk yang kemudian di persepsi melalui sistem keyakinan.

“Sistem keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk keseluruhan angka acuan atau sudut pandang (*universe*) seseorang. Citra-citra itu meliputi realitas masalalu, masakini, dan realitas yang diharapkan di masadepan dan preferensi nilai tentang apa yang ‘seharusnya terjadi’”

Maka dapat disimpulkan bahwa pada awalnya individu menerima berbagai informasi. Informasi yang diterima tersebut kemudian tersaring dalam sistem keyakinan yang dianut. Sistem keyakinan sendiri terdiri dari fakta, yaitu citra tentang apa yang telah, sedang, dan akan terjadi, serta nilai, yaitu citra tentang apa yang seharusnya terjadi. Melalui fakta, individu kemudian memiliki persepsi tentang realitas, yang kemudian mendorongnya untuk mengambil keputusan. Adapun nilai berfungsi sebagai panduan langsung dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, dalam kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi oleh bagaimana persepsi seorang individu pengambil keputusan yang dipengaruhi oleh sistem keyakinannya. Atau secara singkat, keputusan luar negeri dipengaruhi oleh persepsi dari aktor pengambil kebijakan mengenai fakta yang dilihat yang kemudian dikaitkan dengan nilai yang dianut (sistem keyakinan).